

Audit Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (*Value For Money*)

Nastati^{a1*}, Aidil Fitri^{a2}, Zape^{a3}, Elsa^{a4}, Jihan^{a5}, Arjun^{a6}, Muhammad Basri L.^{a7}

^a Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Bombana, Indonesia

¹nastaticici@gmail.com*

* Nastati¹

Received: 17 Juli 2026; Revised: 9 Agustus 2026; Accepted: 19 Agustus 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 menggunakan pendekatan audit kinerja aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian kinerja organisasi. Metode – Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 12 informan kunci yang dipilih secara purposive, terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, staf, pengelola objek wisata, pelaku usaha, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di 5 objek wisata, wawancara mendalam, dan telaah dokumen (LAKIP, Renstra, Perjanjian Kinerja, DPA, dan hasil evaluasi SAKIP). Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Hasil – Dinas Pariwisata mencapai kategori “Berhasil” dengan capaian 71% dan predikat B pada SAKIP. Aspek ekonomi: anggaran sesuai ketentuan namun terkendala keterbatasan untuk pembangunan infrastruktur. Aspek efisiensi: pemanfaatan SDM dan teknologi belum optimal; sistem E-Kinerja terkendala jaringan dan kompetensi digital pegawai. Aspek efektivitas: target kunjungan wisatawan hanya tercapai 42% (37.625 dari 89.366 orang), kontribusi PAD rendah (Rp20.005.000). Faktor penghambat utama: keterbatasan infrastruktur, promosi digital tidak efektif, SDM kurang kompeten, dan monitoring evaluasi lemah. Kesimpulan – Penelitian ini memberikan kontribusi berupa evaluasi komprehensif audit kinerja 3E pada sektor pariwisata daerah kepulauan yang masih jarang diteliti, serta mengidentifikasi faktor-faktor spesifik penghambat kinerja berdasarkan perspektif multi-pemangku kepentingan. Implikasi – Rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan infrastruktur, optimalisasi promosi berbasis digital, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan perbaikan sistem monitoring evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja berkelanjutan.

Kata kunci – audit kinerja, efektivitas, efisiensi, ekonomis

Abstract

Purpose – This study aims to evaluate the performance of the Tourism Office of Bombana Regency for the 2023 fiscal year using a performance audit approach focusing on economy, efficiency, and effectiveness (3E) aspects and to identify factors hindering organizational performance achievement. Method – This research employs a qualitative descriptive approach with 12 key informants selected purposively, consisting of the Head of Office, Heads of Divisions, staff, tourist attraction managers, tourism business actors, and community members. Data were collected through field observations at 5 tourist attractions, in-depth interviews, and document reviews (LAKIP, Strategic Plans, Performance Agreements, Budget Implementation Documents, and SAKIP evaluation results). Data analysis used the Miles and Huberman interactive model with source and method triangulation to ensure data validity. Results – The Tourism Office achieved a “Successful” category with 71% achievement and a B grade in SAKIP. Economy aspect: budget is in accordance with regulations but constrained by limited

infrastructure development. Efficiency aspect: human resource and technology utilization is not optimal; E-Performance system is constrained by network issues and employees' digital competence. Effectiveness aspect: tourist visit target only achieved 42% (37,625 out of 89,366), low regional revenue contribution (Rp20,005,000). Main inhibiting factors: limited infrastructure, ineffective digital promotion, incompetent HR, and weak monitoring and evaluation. Novelty – This study contributes a comprehensive 3E performance audit evaluation in the tourism sector of archipelagic regions which is still rarely studied, and identifies specific performance-inhibiting factors based on multi-stakeholder perspectives. Implications – Improvement recommendations include infrastructure enhancement, optimization of digital-based promotion, strengthening HR capacity through training, and improving monitoring and evaluation systems to support sustainable performance improvement.
Keywords – effectiveness, efficiency, economy, performance audit, regional tourism

How to Cite : Nastati, N., Fitri, A., Zape, Z., Elsa, E., Jihan, J., Arjun, A., & Basri L, M. (2026). Audit Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (Value For Money). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(2), 354 - 361.
<https://doi.org/10.21067/jrma.v14i2.14627>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Pitana & Diarta, 2020; UNWTO, 2023). Di Indonesia, sektor pariwisata menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB hingga 4,8% (Kemenparekraf, 2021). Namun demikian, pengelolaan sektor pariwisata di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Kabupaten Bombana, sebagai daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alam bawah laut, pantai, dan budaya lokal yang khas (Dinas Pariwisata Bombana, 2023). Potensi tersebut mencakup objek wisata unggulan seperti Pantai Nambo, Pulau Kabaena, dan berbagai situs budaya tradisional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana tahun 2023, capaian kinerja organisasi mencapai rata-rata 71% dengan predikat "Berhasil". Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara target dan realisasi pada beberapa indikator utama.

Indikator yang menjadi perhatian utama adalah jumlah kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 37.625 orang dari target 89.366 orang (42%), serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang masih rendah, yaitu Rp20.005.000, hanya sedikit melampaui target Rp20.000.000 (Dinas Pariwisata Bombana, 2023). Kondisi ini mengindikasikan permasalahan mendasar dalam pengelolaan program yang memerlukan evaluasi mendalam. Audit kinerja menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) telah diterapkan dalam pengelolaan program (Bastian, 2021; BPKP, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan audit kinerja di sektor publik memberikan manfaat signifikan dalam memperbaiki tata kelola. Lestari dan Widodo (2021) menemukan audit kinerja di Dinas Perhubungan meningkatkan efisiensi anggaran hingga 15%. Rahayu, Saputra, dan Wulandari (2023) mengungkap promosi wisata berbasis digital mampu meningkatkan kunjungan wisatawan 22% di Lombok. Fitriani dan Nugroho (2022) menunjukkan audit kinerja pada Dinas Pariwisata Bantun mendorong perbaikan sistem pengelolaan destinasi. Surya dan Utama (2022) menyatakan keterbatasan anggaran dan rendahnya kualitas SDM menjadi hambatan utama pengembangan pariwisata di daerah tertinggal.

Sukma dan Hartono (2023) menyoroti peran audit kinerja dalam mendorong akuntabilitas publik. Widayanti dan Prasetyo (2022) menemukan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat menentukan efektivitas program pariwisata. Hidayat dan Kurniawan (2023) mengkaji strategi promosi digital di era new normal. Permana dan Dewi (2024) menunjukkan audit kinerja pariwisata daerah kepulauan memerlukan pendekatan berbeda mengingat karakteristik geografis. Kusumawardhani, dkk. (2024) mengungkap implementasi SAKIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan kinerja.

Research Gap: Keterbatasan studi yang secara komprehensif mengevaluasi audit kinerja 3E pada sektor pariwisata daerah kepulauan dengan karakteristik spesifik seperti Bombana. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada daerah perkotaan, belum menggambarkan tantangan pengelolaan pariwisata di daerah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses (Surya & Utama, 2022; Permana & Dewi, 2024).

State of the Art: Pengembangan model evaluasi kinerja yang mengintegrasikan analisis dokumen perencanaan dan pelaporan dengan data empiris lapangan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai informan kunci, memungkinkan identifikasi faktor penghambat dan pendukung pencapaian kinerja secara holistik (Miles & Huberman, 2014; Creswell & Poth, 2018).

Novelty: Evaluasi komprehensif penerapan prinsip 3E pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana sebagai daerah kepulauan dengan potensi wisata besar namun terkendala infrastruktur dan promosi, serta identifikasi faktor-faktor spesifik penghambat kinerja berdasarkan perspektif multi-pemangku kepentingan yang belum banyak diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi penerapan aspek ekonomis dalam pengelolaan anggaran; (2) mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya; (3) mengevaluasi efektivitas pencapaian target kinerja; dan (4) mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian kinerja.

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan konstruktif bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun strategi perbaikan kinerja

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena di lapangan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja organisasi dari perspektif berbagai pemangku kepentingan (Miles & Huberman, 2014; Creswell & Poth, 2018). Penelitian deskriptif digunakan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik audit kinerja aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Sugiyono, 2019).

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada Maret-Mei 2026. Pemilihan lokasi karena: (1) daerah kepulauan dengan potensi pariwisata besar namun terkendala pengembangan; (2) instansi bertanggung jawab pengelolaan sektor pariwisata; (3) kesenjangan signifikan antara target dan realisasi kinerja; (4) aksesibilitas peneliti terhadap data dan informan memungkinkan penelitian mendalam.

Sumber dan Jenis Data Data Primer: Observasi lapangan di 5 objek wisata (Pantai Nambo, Pulau Kabaena, dan 3 situs budaya). Wawancara mendalam dengan 12 informan kunci dipilih secara purposive:

1. 1 Kepala Dinas Pariwisata
2. 2 Kepala Bidang (Perencanaan dan Promosi)
3. 3 Staf pelaksana program
4. 2 Pengelola objek wisata
5. 2 Pelaku usaha pariwisata (penginapan dan biro perjalanan)
6. 2 Masyarakat sekitar objek wisata

Kriteria informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan pariwisata, bersedia diwawancara, dan dapat memberikan informasi mendalam (Patton, 2015). Data Sekunder: Renstra 2018-2023, LAKIP 2023, Perjanjian Kinerja 2023, DPA, Laporan Realisasi Anggaran,

hasil evaluasi SAKIP, dan peraturan terkait.

Instrumen utama adalah peneliti sendiri (human instrument) dengan dilengkapi:

1. Panduan observasi mencakup kondisi fisik destinasi, fasilitas pendukung, kebersihan, keamanan, aktivitas pengunjung, dan interaksi pengelola-wisatawan.
2. Pedoman wawancara semi-terstruktur berdasarkan indikator audit kinerja 3E yang telah divalidasi melalui expert judgment.
3. Daftar periksa (checklist) telaah dokumen untuk identifikasi kesesuaian dokumen dengan standar dan konsistensi perencanaan-pelaksanaan-pelaporan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Langsung: Pengamatan kondisi objek wisata, sarana-prasarana, pelaksanaan program. Dilakukan 2 kali kunjungan per objek wisata.
2. Wawancara Semi-Terstruktur: Durasi 45-90 menit per informan, direkam dengan izin, ditranskrip verbatim. Dilakukan di kantor Dinas, objek wisata, atau tempat usaha informan.
3. Telaah Dokumen: Penelitian dokumen menggunakan daftar periksa untuk identifikasi kesesuaian dan konsistensi dokumen (Bowen, 2009).

Prosedur Audit Kinerja Tahapan audit kinerja berdasarkan indikator 3E:

1. Perencanaan Audit: Identifikasi tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja.
2. Pengumpulan Bukti Audit: Observasi, wawancara, dan telaah dokumen.
3. Evaluasi Aspek Ekonomis: Membandingkan realisasi anggaran dengan rencana, menganalisis efisiensi biaya.
4. Evaluasi Aspek Efisiensi: Mengukur rasio output/input, menganalisis pemanfaatan SDM dan teknologi.
5. Evaluasi Aspek Efektivitas: Membandingkan capaian dengan target, menganalisis faktor pencapaian.
6. Pelaporan: Menyusun temuan dan rekomendasi.

Teknik Analisis Data Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014):

1. Reduksi Data: Memilih, memfokuskan, menyederhanakan data. Pengkodean tematik berdasarkan kerangka 3E.
2. Penyajian Data: Narasi deskriptif, tabel, matriks perbandingan.
3. Penarikan Kesimpulan: Interpretasi data mengacu tujuan penelitian dan kerangka 3E. Verifikasi melalui diskusi antarpeleliti dan konfirmasi informan.

Uji Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai informan berbeda (Kepala Dinas, Bidang, staf, pengelola, pelaku usaha, masyarakat).
2. Triangulasi Metode: Membandingkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen.
3. Member Check: Memverifikasi temuan awal dengan informan kunci.
4. Peer Debriefing: Diskusi dengan kolega dan pembimbing untuk meminimalkan bias

PEMBAHASAN

Berisi Temuan Umum Penelitian menemukan Dinas Pariwisata Bombana mencapai kategori "Berhasil" dengan capaian 71% dan predikat B pada SAKIP. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat kelemahan signifikan yang perlu diperbaiki. Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas: "Kami sudah berusaha maksimal mencapai target. Capaian 71% cukup baik mengingat keterbatasan anggaran dan SDM.

Namun kami masih perlu perbaikan, terutama pengembangan destinasi dan promosi wisata." (Wawancara, 15 April 2026)

Pernyataan ini mengindikasikan kesadaran pimpinan akan pentingnya perbaikan berkelanjutan, namun keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama. Hal ini konsisten dengan Surya dan Utama (2022) yang menyatakan keterbatasan anggaran dan SDM menjadi hambatan utama pengembangan pariwisata di daerah tertinggal. Analisis Aspek Ekonomis Pemeriksaan terhadap DPA dan laporan realisasi anggaran 2023 menunjukkan penggunaan anggaran sesuai program dan kegiatan yang direncanakan. Tidak ditemukan indikasi penyimpangan. Pengeluaran memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan organisasi. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan program pengembangan destinasi belum maksimal, terutama pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung

Kepala Bidang Perencanaan menyatakan: "Anggaran terbatas, beberapa program pengembangan destinasi seperti pembangunan infrastruktur dasar belum maksimal. Kami prioritaskan program paling mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat." (Wawancara, 20 April 2026). Observasi lapangan menunjukkan Pantai Nambo dan Pulau Kabaena kekurangan fasilitas dasar: akses jalan rusak, tempat parkir tidak memadai, toilet umum tidak layak, tidak ada pos keamanan. Hal ini memengaruhi kenyamanan wisatawan dan daya tarik destinasi. Pengelola objek wisata mengungkapkan: "Kami terbantu program Dinas, tetapi fasilitas dasar seperti jalan menuju pantai masih rusak, toilet belum layak. Wisatawan enggan berlama-lama atau kembali." (Wawancara, 22 April 2026)

Tabel 1. Realisasi anggaran program pengembangan destinasi 2023

Program	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Status
Pembangunan Infrastruktur	350.000.000	275.000.000	78,6%	Belum optimal
Wisata				
Promosi Wisata	200.000.000	150.000.000	75,0%	Belum optimal
Pengembangan SDM	150.000.000	135.000.000	90,0%	Cukup optimal
Pariwisata				
Total	700.000.000	560.000.000	80,0% -	

Sumber: DPA dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Bombana 2023 (diolah)

Temuan ini sejalan dengan Surya dan Utama (2022) tentang keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama pengembangan pariwisata daerah tertinggal. Fitriani dan Nugroho (2022) juga menemukan keterbatasan anggaran menghambat pengembangan infrastruktur pariwisata, berdampak pada daya saing destinasi. Permana dan Dewi (2024) menambahkan daerah kepulauan menghadapi biaya transportasi dan logistik lebih tinggi, sehingga anggaran tidak cukup memenuhi kebutuhan pengembangan komprehensif.

Aspek ekonomis telah menunjukkan upaya menggunakan anggaran hemat dan bijaksana. Namun, masih ada ruang peningkatan ekonomisasi melalui perencanaan lebih matang dan prioritas program tepat. Lestari dan Widodo (2021) menunjukkan audit kinerja aspek ekonomis mengidentifikasi potensi penghematan melalui analisis biaya-manfaat dan eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah.

Analisis Aspek Efisiensi Dinas Pariwisata telah menerapkan sistem pelaporan elektronik (E-Kinerja) dan evaluasi program berkala melalui rapat koordinasi. Ini menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi administrasi dan pemantauan pelaksanaan tugas. Namun, pemanfaatan SDM dan teknologi informasi belum optimal. Staf Bidang Promosi mengungkapkan: "Kami sudah menggunakan E-Kinerja, tetapi banyak kendala teknis seperti jaringan internet bermasalah.

Kemampuan pegawai mengelola media digital untuk promosi juga terbatas. Kami masih perlu pelatihan." (Wawancara, 25 April 2026)

Kendala teknis jaringan internet menjadi hambatan serius. Bombana sebagai daerah kepulauan menghadapi akses internet belum merata, sehingga implementasi sistem digital terkendala. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi wisata masih terbatas dan tidak terencana baik. Pelaku usaha pariwisata menyatakan: "Promosi wisata di media sosial masih jarang dan kurang menarik. Konten tidak konsisten dan tidak menjangkau target audiens tepat. Berbeda dengan Lombok atau Bali yang promosinya masif dan profesional." (Wawancara, 28 April 2026)

Tabel 2. Indikator Efisiensi Pelaksanaan Program 2023

Indikator	Target	Realisasi	Efisiensi
Rasio biaya promosi per kunjungan	Rp5.000	Rp8.500	Rendah
Jumlah kegiatan promosi	12 kegiatan	8 kegiatan	66,7%
Penggunaan E-Kinerja	100% pegawai	65% pegawai	Belum optimal
Pelatihan SDM digital	digital 4 kali/tahun	2 kali/tahun	50%

Sumber: Hasil Wawancara dan Telah Dokumen (2026)

Kondisi ini menyebabkan output program belum mencapai hasil optimal sesuai sumber daya digunakan. Program promosi wisata dengan anggaran tertentu belum menghasilkan peningkatan kunjungan signifikan. Penelitian Lestari dan Widodo (2021) menunjukkan efisiensi anggaran meningkat signifikan jika diikuti penguatan kapasitas SDM dan optimalisasi teknologi. Hidayat dan Kurniawan (2023) menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital meningkatkan efisiensi promosi dan pemasaran pariwisata di era new normal. Rahayu, Saputra, dan Wulandari (2023) menemukan promosi digital efektif meningkatkan kunjungan wisatawan signifikan dengan biaya lebih rendah dibanding promosi konvensional.

Analisis Aspek Efektivitas Berdasarkan LAKIP 2023, capaian kinerja 71% dengan kategori "Berhasil". Dari empat sasaran strategis, tiga mencapai target maksimal, satu sasaran (peningkatan kunjungan wisatawan) masih di bawah target.

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Bombana 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	89.366 org	37.625 org	42,1%
		Rata-rata lama tinggal	2 hari	2 hari	100%
2	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Penerimaan PAD Sektor Pariwisata	Rp20.000.000	Rp20.005.000	100%
3	Terwujudnya kepemudaan dan keolahragaan berdaya saing	Persentase peran serta kepemudaan	2%	5%	250%
Jumlah prestasi olahraga			41	41	100%

Sumber: LAKIP Dinas Pariwisata Bombana 2023 (diolah)

Kunjungan wisatawan 42% dari target, hanya 37.625 dari 89.366 orang. Kontribusi PAD rendah (Rp20.005.000) meskipun mencapai target. Temuan ini sejalan dengan Rahayu, Saputra, dan Wulandari (2023) bahwa promosi berbasis digital meningkatkan kunjungan wisatawan signifikan. Widayanti dan

Prasetyo (2022) menemukan efektivitas program pengembangan pariwisata ditentukan koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian program dengan karakteristik lokal.

Faktor penghambat utama dikelompokkan menjadi:

1. Faktor Internal: Keterbatasan anggaran, SDM kurang kompeten, sistem Monev lemah, koordinasi antar bidang belum optimal.
2. Faktor Eksternal: Aksesibilitas terbatas (daerah kepulauan), infrastruktur dasar belum memadai, tingkat kunjungan dipengaruhi musim dan akses transportasi

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana tahun 2023 secara umum telah berjalan baik dengan capaian kinerja 71% (kategori "Berhasil") dan predikat B pada SAKIP. Penggunaan anggaran sesuai ketentuan, dan tiga dari empat sasaran strategis tercapai. Namun, masih terdapat kelemahan signifikan yang memerlukan perbaikan.

Kontribusi Penelitian: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan audit kinerja sektor publik dengan: (1) menyediakan model evaluasi komprehensif aspek 3E pada sektor pariwisata daerah kepulauan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor spesifik penghambat kinerja berdasarkan perspektif multi-pemangku kepentingan; (3) memperkaya literatur tentang audit kinerja sektor publik di daerah dengan karakteristik geografis khusus.

Implikasi Praktis: Hasil penelitian memberikan masukan bagi Dinas Pariwisata Bombana untuk: (1) meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata; (2) mengoptimalkan promosi berbasis digital melalui pelatihan konten kreator dan kerja sama influencer; (3) meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi; (4) memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja terukur.

Keterbatasan Penelitian: (1) Penelitian hanya mencakup satu tahun anggaran (2023) sehingga belum dapat menilai tren kinerja jangka panjang; (2) Lokasi penelitian terbatas pada satu instansi, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati; (3) Keterbatasan akses ke beberapa dokumen internal yang bersifat rahasia.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya: Penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) melakukan evaluasi dampak implementasi rekomendasi audit terhadap peningkatan kinerja dalam jangka waktu tertentu; (2) mengkaji perbandingan audit kinerja antar Dinas Pariwisata di daerah kepulauan lainnya;

(3) mengembangkan model prediksi pencapaian target kinerja pariwisata berbasis faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi.

Dengan implementasi rekomendasi secara konsisten, kinerja Dinas Pariwisata Bombana dapat terus meningkat sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan melalui sektor pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Audit Kinerja*. Jakarta: BPKP.
- Bandaso, M. S., Junaidi, & Rahmawati. (2026). Analisis kinerja pemerintah daerah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam perspektif audit kinerja. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v7i1.28609>
- Bandaso, M. S., Junaidi, & Rahmawati. (2026). Analisis kinerja pemerintah daerah menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam perspektif audit kinerja. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v7i1.28609>
- Bastian, I. (2021). *Audit Sektor Publik (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana. (2018). *Rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana Tahun 2018–2023*. Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana. (2023). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2023*. Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana. (2023). *Perjanjian kinerja Tahun 2023*. Dinas Pariwisata Kabupaten Bombana.
- Faizal, D., & Nugrahanti, T. P. (2026). Audit kinerja sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas publik di sektor pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36988>
- Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 245–259. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22143>
- Kemenparekraf. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 799–815. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). London: Sage Publications.
- Pambudi, A. S., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluasi dukungan DAK fisik bidang pariwisata bagi pembangunan daerah: Studi kasus nasional dan Provinsi Jawa Timur. *Bappenas Working Papers*, 5(1). <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). London: Sage Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2020). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Rahima, P., Suriyati, & Ibrahim, I. D. K. (2023). Analisis strategi promosi dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di kawasan wisata Pusuk Sembalun Kabupaten Lombok Utara. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.30812/target.v5i1.3052>
- Rahmah, H. R. F., Nur'Aini, S., Septia, W., Ramaida, P., Novarida, D., Aziz, S., & Febryanti, B. (2023). Pemanfaatan digital marketing bagi destinasi wisata di era new normal. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 71–83. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1579>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti, S., Damayanti, M., Esariti, L., Rahdriawan, M., & Medina, N. C. (2022). Tantangan pengembangan wisata berdasarkan dinamika partisipasi masyarakat Desa Montongsari, Kabupaten Kendal. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(4), 367–380. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.49740>
- UNWTO. (2023). *Tourism and Sustainable Development Goals*. Madrid: World Tourism Organization.